

RENCANA KERJA (RENJA) BPKD TAHUN 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)
Jalan S. Sukowati No. 52
Telp. (0732) 21503 – 21410 Fax. 21350**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang penting dalam era reformasi. Melalui otonomi daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan melalui Penyelarasn Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Terhadap Program Prioritas Provinsi dan Prioritas Nasional. Visi dan Misi Kabupaten merupakan hal yang harus dicapai oleh pemerintah daerah yang telah terpilih. Pencapaian Visi dan Misi tersebut harus tergambar dengan baik pada Visi dan Misi yang ada pada OPD. Salah satu instrumen yang harus ada dalam perwujudan visi dan misi OPD adalah Renja.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong membuat Renja Tahun 2023. Renja ini akan dijadikan panduan dalam penyusunan anggaran dan prioritas kegiatan, tentunya dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Rejang Lebong yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dari BPKD Kabupaten Rejang Lebong.

Diharapkan Renja BPKD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh *stakeholders* tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPKD Tahun 2023. Setelah membaca laporan ini, pembaca dapat memberikan masukan untuk perbaikan penyusunan laporan ini dimasa yang datang, sehingga BPKD dapat memberikan informasi yang diperlukan dengan baik.

Curup, Februari 2022
Plt. Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong

ANDI FERDIAN, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19850323 201001 1029

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen rencana kerja ini memuat program dan kegiatan yang direncanakan serta menggambarkan keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang akan dicapai, dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023. Selain itu Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 harus terukur dan dapat dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang tersedia, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan demikian, alokasi sumber daya yang tersedia perlu dibatasi dengan pagu anggaran yang realistis berdasarkan kebutuhan objektif dan nyata sesuai dengan karakteristik daerah agar tekanan pengeluaran tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan.

Maksud disusunnya Rencana Kerja BPKD Tahun 2023 adalah:

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf BPKD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Rejang Lebong memahami arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan berdasarkan anggaran BPKD Kabupaten Rejang Lebong yang telah disahkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA);

3. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
4. Memberikan gambaran program dan kegiatan yang direncanakan serta menggambarkan tau hasil (*outcome*) yang akan dicapai keluaran (*output*) aselama 1 (satu) tahun.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BPKD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah:

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPKD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
2. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPKD dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program

Curup, Februari 2022
Plt. Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Rejang Lebong

ANDI FERDIAN, SE
Penata TK.I (III/d)
NIP. 19850323 201001 1029

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	19
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	21
2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah	23
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	24
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD	25
3.3 Program dan kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	29
BAB V PENUTUP	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong. Dokumen rencana kerja ini memuat program dan kegiatan yang direncanakan serta menggambarkan keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang akan dicapai, dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renja merupakan dokumen perencanaan yang memuat, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaannya, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pihak pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja sangat berpengaruh terhadap suksesnya pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Top-Down dan Bottom-Up maka perlu dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tingkat kecamatan sehingga bias menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga tujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dapat terwujud.

Mengingat pentingnya dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan tersebut meliputi:

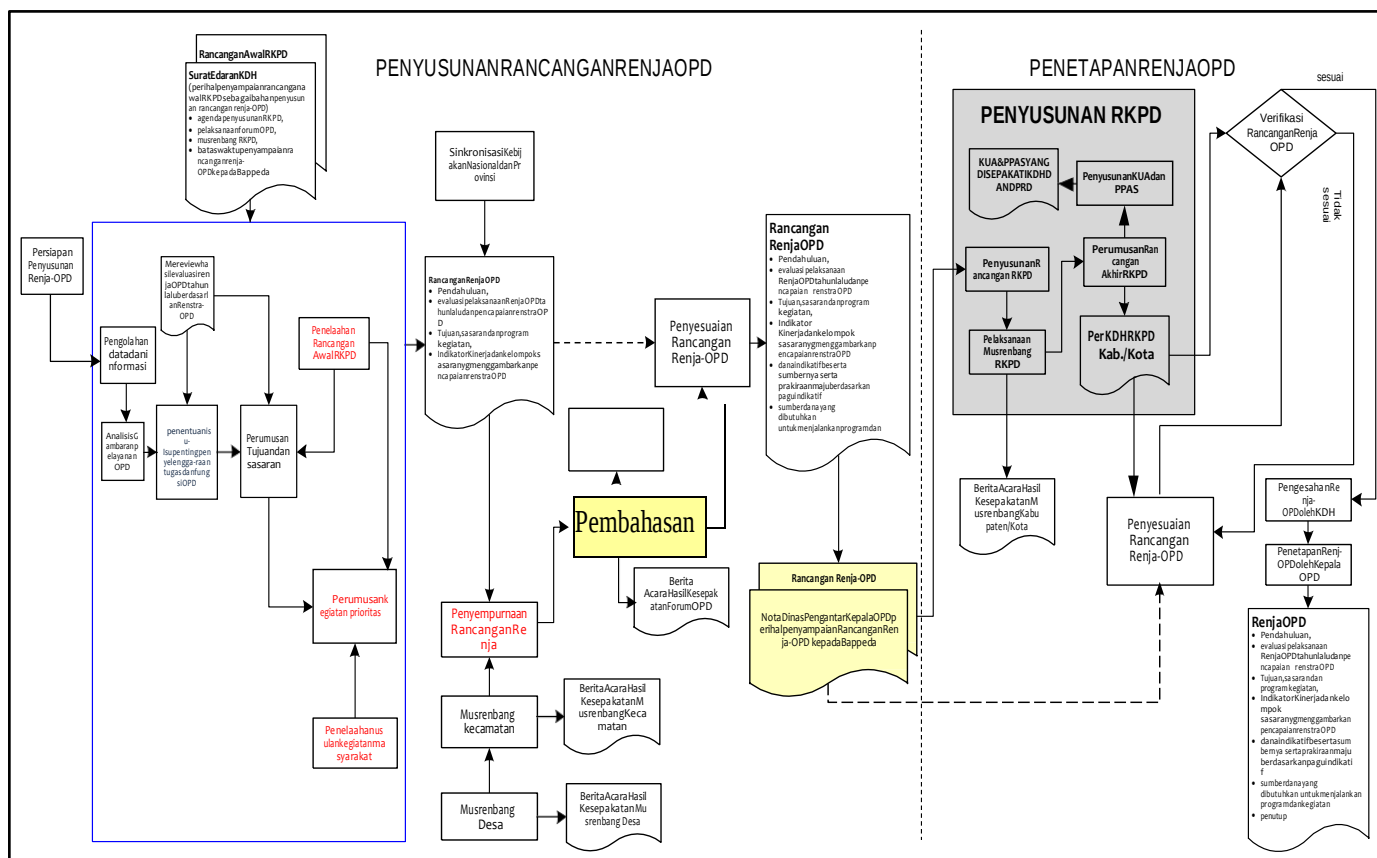
1. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
2. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
4. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

Sebagai dokumen rencana tahunan Organisasi Perangkat Daerah, Renja BPKD Kabupaten Rejang Lebong mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah. Peranan Renja antara lain sebagai berikut:

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
2. Renja merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2023.
3. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam penyusunan Renja ada beberapa tahapan yang dilalui:

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



Penyusunan Renja OPD dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses berurutan, yang mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan Renja OPD.
2. Tahap penyajian rancangan Renja OPD.

Perumusan rancangan Renja OPD dilakukan melalui beberapa tahapan :

1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan OPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
4. Menghimpun isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
5. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
6. Perumusan tujuan dan sasaran;

7. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
8. Perumusan kegiatanprioritas;
9. Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
10. Penyempurnaan rancangan RenjaOPD;
11. Pembahasan forum OPD;dan
12. Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah, arahan menteri terkait dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Proses penyusunan Renja OPD, tidak terlepas keterkaitannya dengan dokumen Renstra OPD, dokumen RKPD dan proses penyusunan RAPBD di Kabupaten Rejang Lebong. Dimana RencanaStrategis (Renstra) OPD yang disampaikan oleh Kepala BPKD Kabupaten Rejang Lebong kepada Kepala Bappeda dan memperoleh pengesahan Bupati tersebut menjadi pedoman unit kerja di lingkunganOPD dalam penyusunan rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong .Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 harus terukur dan dapat dilaksanakan berdasarkan sumber daya yang tersedia, khususnya ketersediaan anggaran. Dengan demikian, alokasi sumber daya yang tersedia perlu dibatasi dengan pagu anggaran yang realistis berdasarkan kebutuhan objektif dan nyata sesuai dengan karakteristik daerah agar tekanan pengeluaran tidak menghambat pencapaian sasaran pembangunan.

Penyusunan program dan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 mempertimbangkan berbagai hal diantaranya:

1. Kemampuan profesionalisme aparatur dalam mengelola pendapatan, keuangan dan asset daerah;
2. Kompetensi aparatur, Good Governance dan daya saing daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah;
3. Kemampuan aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah;
4. Rancangan peraturan daerah tentang APBD, APBD-P dan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
5. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan pendapatan daerah;
6. Sarana dan prasarana yang mendukung dan memungkinkan tercapainya target pelaksanaan pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah;
7. Kemampuan aparatur BPKD dalam menyusun perubahan dan perhitungan APBD;
8. Kemampuan untuk menggali dan mengoptimalkan sumber penerimaan daerah;
9. Kemampuan aparatur dalam pengelolaan barang milik daerah; dan
10. Kemampuan menghimpun dan mendata seluruh aset daerah Kabupaten Lebong.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 618, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahantas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 Tahun 2019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 Tahun 2019);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2012 Nomor 80);
23. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);
24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 Nomor 161)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja BPKD Tahun 2023 adalah:

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan tahun selanjutnya (n+1) yang mengacu kepada visi-misi Bupati Kabupaten Rejang Lebong ,yang dijabarkan kedalam visi-misi BPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peranan BPKD dalam system organisasi daerah.

2. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran staf BPKD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
3. Memberikan benang merah program dan kegiatan yang akan direncanakan sertamenggambarkan keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang akan dicapai selama 1 (satu)tahun;dan
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BPKD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPKD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPKD dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program;dan
3. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional.

1.4 SistematikaPenulisan

Rencana Kerja BPKD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

- 1.1 LatarBelakang
- 1.2 LandasanHukum
- 1.3 Maksud danTujuan
- 1.4 SistematikaPenulisan

BABII EVALUASI DAN PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis PelayananOPD
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2023 diperlukan evaluasi Rencana Kerja OPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya:

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 dengan melihat evaluasi pelaksanaan Renja OPD pada tahun sebelumnya dan jika dilihat dari serapan anggaran tahun 2021 diantaranya sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 7.379.800,00,- (99,99%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 7.380.300,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD telah tercapai dengan telah tersedianya sepuluh (10) Dokumen Laporan Perencanaan dan Pelaporan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah

1) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 223.666.700,00,- (90,52%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 247.082.700,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD 14 Dokumen Blangko daftar gaji, logo pemda polos dan bergaris.

2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah

1) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS

Berdasarkan hasil pengukuran pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 245.430.500,00,- (98,29%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 249.693.500,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS ditunjang dengan telah tercetaknya Dokumen KUA dan PPAS Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 50 Buku.

2) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Berdasarkan hasil pengukuran pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 264.888.800,00,- (98,14%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 269.897.500,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditunjang dengan telah tercetaknya Dokumen Perda APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 100 Buku.

3) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

Berdasarkan hasil pengukuran pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 261.160.835,00,- (83,96%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 311.063.150,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ditunjang dengan telah tercetaknya Dokumen Perda Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 100 Buku.

b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan daerah

1) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 130.489.783,25,- (96,80%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 134.808.550,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditunjang dengan telah tercetaknya Dokumen Laporan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 35 Buku.

2) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, diketahui

bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 190.734.250,00,- (97,52%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 195.590.000,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota ditunjang dengan telah tersusunya Dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 5 Dokumen.

3) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 140%, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 54.883.000,00,- (89,26%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 61.487.500,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah ditunjang dengan telah terselesaikan 14 kasus MP-TPTGR Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

c. Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah

1) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 0 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 14.174.800,00,- (88,18%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 16.074.200,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota tidak tercapai dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga tidak dapat dilaksanakan sosialisasi yang bersifat tatap muka.

3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

1) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 236.657.432,00,- (91,03%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 259.984.450,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah telah tercapai dengan telah Tersusunnya SSH dan ASB Kabupaten Rejang Lebong di pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

2) Pengamanan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 104.120.560,00,- (76,86%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 135.459.760,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah telah tercapai dengan telah Terlaksananya Pengamanan Fisik Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah Kabupaten Rejang Lebong selama 12 bulan di Kabupaten Rejang Lebong.

3) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindah-tanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 440.639.200,00,- (94,92%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 464.214.250,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemus-nahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah telah tercapai dengan telah Tersusunnya Data Aset/ Barang Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 45 OPD di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

4. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 56.040.200,00,- (99,59%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 56.270.200,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah telah tercapai dengan tersedianya Pajak daerah dan Retribusi Lokal di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong selama 12 Bulan.

2) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 419.607.000,00,- (99,25%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 422.786.000,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah telah tercapai dengan tersedianya data Objek dan Subyek Pajak PBB Pajak daerah dan Retribusi Lokal di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 15 Kecamatan.

3) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 206.115.000,00,- (98,83%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 208.558.000,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) telah tercapai dengan sudah dimuktahirkan data Objek dan Subyek Pajak pada 15 Kecamatan di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

4) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 98.953.825,00,- (99,57%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 99.378.325,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah telah tercapai dengan sudah tersedianya Laporan Pembukuan tentang penerimaan Daerah di Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 12 bulan.

5) Penagihan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran Pada Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, diketahui bahwa pencapaian kinerja sasaran adalah 100 %, hal ini dana yang terealisasi sebesar Rp. 109.709.875,00,- (98,02 %) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 111.930.025,00,-. Pencapaian kinerja di dalam Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah telah tercapai dengan sudah bertambahnya data wajib pajak sebanyak 300 wajib pajak di Kabupaten Rejang Lebong.

Pada Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi Kinerja sebesar 100% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 24.969.730.269,33 (95,38%) target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 26.178.523.596,39,-. Realisasi Kinerja sebesar 100 % ditunjang oleh kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terlaksana dengan baik artinya seluruh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sudah tersusun dengan baik dan akuntabel sehingga menunjang pencapaian kinerja program, selain itu kegiatan Peningkatan Manajemen Aset / Barang daerah juga ikut menyumbang pencapaian kinerja program dikarenakan seluruh pengelolaan BMD Pemerintah kabupaten Rejang Lebong sudah dilaksanakan dengan baik. Penyusunan Sistem dan Kelengkapan Gaji PNS di Kabupaten Rejang Lebong juga memberi andil dalam pencapaian kinerja program didalam kegiatan ini juga memberi andil dalam terjadinya korupsi, nepotisme dan gratifikasi dikarenakan pengelolaan gaji dan pencairan kegiatan mesti menggunakan transaksi non tunai artinya seluruh pencairan uang harus menggunakan rekening masing-masing. Pada kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD juga memberi andil dalam pencapaian kinerja program hal ini dapat dilihat dari

tahapan penyusunan Perda APBD melalui sistem Simda integrated yang terhubung antara BPKD dan Bappeda Kabupaten Rejang Lebong dan dalam penyusunan perda APBD maupun APBD-P sudah tepat waktu. Selanjutnya Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Belanja (ASB) juga telah melakukan telah berhasil menyusun dokumen SSH dan ASB yang artinya dengan adanya dokumen ini akan mempersempit peluang korupsi, nipotisme dan gratifikasi selain itu dokumen tersebut juga sebagai pedoman untuk seluruh OPD dalam penyusunan dokumen perencanaan. Sehingga menciptakan dokumen perencanaan yang baik dan realistis sehingga ini akan menunjang pencapaian kinerja program yaitu “WTP”.

Pada kegiatan Optimalisasi Pencapaian Target pajak Daerah dan Retribusi/ Lokal realisasi kinerjanya pada tahun 2021 yaitu 6,98% sedangkan realisasi anggaran ini dana yang terealisasi sebesar Rp.69.785.794.622,81 (84,27%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 82.814.694.310,00,- namun hal itu tidak menunjang peningkatan kinerja pada Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah yang hanya realisasinya 6,98% dengan target 12 % yang artinya realisasi kinerja sebesar 58,17% dikarenakan akibat dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurang optimalnya kinerja dalam mencapai sasaran kinerja program.

Pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dan kegiatan di BPKD Kabupaten Rejang dapat disimpulkan bahwa kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Pelaporan dalam realisasi kinerjanya yaitu 100%, sedangkan realisasi anggaran ini dana yang terealisasi sebesar 7.919.000,00,- (98,37%) dari target dana yang dianggarkan sebesar Rp. 8.050.000,-. Kegiatan Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan dan Pelaporan menunjang Kinerja pada sasaran strategis Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD dengan indikator Nilai Evaluasi SAKIP Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD dengan target pada tahun 2021 adalah “B” sedangkan Realiasi Kinerja adalah “BB” tercapai dengan penilaian evaluasi Sakip dari inspektorat daerah.

Anggaran untuk Tahun 2021 dapat dilihat sebagaimana dituangkan di dalam tabel TC.29 (Tabel Terlampir)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka peranan BPKD sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggung-jawaban APBD sudah berjalan dengan baik dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan, hal tersebut ditandai dengan indikator pelayanan BPKD sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Pelayanan BPKD
1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
2	Nilai Evaluasi SAKIP
3	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan

Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas pelayanan keuangan daerah. Hal ini disebabkan adanya beberapa faktor penghambat yang menjadi tantangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sejak Badan kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa virus Covid-19 sebagai pandemi. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia juga menyatakan masalah virus Corona sudah menjadi bencana nasional non alam. Selanjutnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah beserta jajarannya untuk saling bahu membahu membuat beberapa langkah taktis sebagai upaya pencegahan penyebaran Virus Covid-19 di masyarakat. Dari level menteri sampai kepala daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota berupaya menanggulangi pandemi virus covid-19, sehingga segala aktifitas pemerintahan dan anggaran pemerintah daerah berfokus pada penanganan covid-19. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga tidak luput dari dampak pandemi covid-19, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan leading sector dalam pengelolaan keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah juga secara juga ikut memprioritaskan kepentingan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus Covid-19, diantaranya dengan memangkas anggaran yang tidak dapat terlaksana untuk kepentingan pemerintah kabupaten Rejang lebong, memberlakukan Work From Home untuk seluruh pegawai BPKD, Menggunakan sarana teknologi dalam melaksanakan pekerjaan dan yang terakhir juga melaksanakan protokol kesehatan Covid-19. Dengan adanya pandemi virus

Covid-19 banyak pekerjaan tidak dapat dilakukan dengan semestinya sehingga mempengaruhi anggaran dan serta kinerja OPD BPKD pada tahun 2021.

2. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Rejang Lebong. Seperti halnya dalam ketersediaan SDM untuk menagih dan mendata subyek dan obyek pajak daerah, IT dalam pengelolaan SIMDA KEUANGAN, pada bagian Sekretariat, masih kurangnya pegawai yang berkualitas dalam menunjang Tugas khususnya pada subbag Umum dan Kepegawaian.
3. Masih adanya tumpang tindih tupoksi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja pada BPKD Kabupaten Rejang Lebong.
4. Masih sulitnya mengimplementasikan penganggaran yang berbasis kinerja pada seluruh aparatur BPKD. Sebagai solusi alternatif dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
5. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif direncanakan pada tahun 2021 akan dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan khususnya pada bidang aset, bidang pendaftaran dan pendataan dan bidang pendapatan dan penagihan BPKD Kabupaten Rejang Lebong.
6. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.
7. Masih banyaknya kegiatan yang tidak berorientasi pada outcome atau capaian sehingga kegiatan terkadang tidak menunjang visi dan misi BPKD Kabupaten Rejang Lebong.
8. Masih banyak OPD yang tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Masih belum berjalan dengan baiknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan BPKD Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah melalui pelaksanaan mekanisme pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan adalah :

1. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan**

Dengan indikator program jumlah laporan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .

2. **Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**

Dengan indikator program opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dari WDP menjadi WTP.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

BPKD belum memenuhi target untuk seluruh indikator . Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja BPKD yang makin membaik yaitu pada indikator opini atas laporan keuangan pemerintah daerah dan nilai wvaluasi SAKIP namun pada indiaktor persentase pendapatan asli daerah terhadap pendapatan tidak konsisten pencapaiannya dan bahkan cenderung menurun kinerjanya.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong dibentuk pada tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 09 Tahun 2016 dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPKD Kabupaten Rejang Lebong .

Dalam melaksanakan Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas :

“Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan serta bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah“

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai terkait dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam upaya mewujudkan manajemen pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan maka permasalahan - permasalahan yang dihadapi ke depan antara lain :

1. Kurangnya kualitas SDM pada BPKD Kabupaten Rejang Lebong;
2. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah;
3. Belum optimalnya akurasi data asset pada tiap-tiap SKPD;
4. Pensertifikatan asset berupa lahan milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong belum optimal;
5. Masih banyak asset daerah yang belum teramankan ;
6. Kurangnya lokasi untuk pengamanan asset daerah;
7. Masih belum optimalnya Revolving Uang Persediaan (UP) di beberapa SKPD;
8. Belum tertibnya pelaporan perpajakan pusat baik pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai yang disetorkan oleh bendahara pengeluaran SKPD ke kantor Pelayanan Pajak;
9. Pengaturan dana non APBD belum ada;
10. Belum adanya dasar peraturan pengelolaan alokasi dana desa baik ADD ataupun DD;
11. Masih banyaknya laporan keuangan SKPD yang tidak sesuai dengan SAP;
12. Kurangnya optimalnya akurasi data Subyek dan objek Pajak pada Kabupaten Rejang Lebong;
13. Masih belum adanya sistem berbasis online dalam pengelolaan asset daerah;
14. Kurangnya kesadaran masyarakat dan badan usaha untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

RKPD disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program kegiatan. Hal terpenting sebenarnya adalah sinkronisasi antara program kegiatan yang terdapat dalam Renja BPKD dengan Renstra BPKD. Disinilah letak dan fungsi perencanaan pada sebuah OPD dalam menentukan program kegiatan. Usulan kegiatan yang baru bias dimasukkan atau ditolak pada saat penyusunan Rencana Kerja Tahunan. Kesenambungan pelaksanaan perencanaan yang telah dibuat sangat membantu dalam mencapai visi dan misi BPKD.

Dalam penyusunan Rencana Kerja 2023 ini, BPKD sudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) permuktahiran berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/Kegiatan pada BPKD Kabupaten Rejang Lebong bersumber dari hasil penelaahan isu-isu strategis (teknokratis), sedangkan usulan yang berasal dari usulan para pemangku kepentingan, Pokok-pokok Pikiran Anggota DPRD (politis), LSM, asosiasi – asosiasi , perguruan tinggi dan usulan masyarakat melalui musrenbang kecamatan , yang akan di diskusikan di forum OPD dan langsung ditujukan kepada OPD yang menangani, tidak ada usulan Musrenbang (Partisipatif) yang masuk untuk Renja BPKD Tahun 2023, yang ditunjukkan dengan Tabel T-C.32.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang berada didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah yang didasarkan pada Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004, terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kebijakan pemerintah tersebut idealnya merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Panjang yang terdapat di Pemerintah Pusat, dengan mempertimbangkan potensi daerah, sehingga terdapat sinkronisasi program kegiatan dan pada akhirnya mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
2. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
3. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
4. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah, nasional, dan global.
5. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kemudian disusun suatu perencanaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan. Ada lima dokumen perencanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis – Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja – Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Di antara dokumen- dokumen perencanaan tersebut harus saling terkait, dimana dokumen yang lebih teknis (jangka pendek) mengikuti atau memperhatikan dokumen yang lebih bersifat strategis (jangka panjang) dokumen daerah harus memperhatikan dokumen tingkat nasional, hubungan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Strategis Daerah di tingkat pusat dan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Tujuan disusunnya Rencana Kerja BPKD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah :

1. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur BPKD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
2. Sebagai penjabaran visi, misi, kebijakan dan program daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional;
3. Sebagai Acuan resmi bagi seluruh jajaran staf BPKD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan, dan
4. Memberikan kemudahan seluruh jajaran aparatur BPKD dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program.

Sasaran disusunnya Rencana Kerja BPKD tahun 2023 adalah :

1. Memberikan gambaran program dan kegiatan yang direncanakan serta menggambarkan keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) yang akan dicapai selama 1 (satu) tahun;
2. Membuat dokumen perencanaan yang akan memudahkan seluruh jajaran Aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong , dalam memahami arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan, berdasarkan anggaran BPKD Kabupaten Rejang Lebong yang telah disahkan dalam Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA); dan
3. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan

3.3 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong memiliki Program/ Kegiatan yang bersumber dari APBD. untuk Tahun Anggaran 2023, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
	Koordinasi dan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kabupaten/Kota
	Koordinasi, sinkronisasi dan Penyelesaian tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
Pengelolaan Barang Milik Daerah	

	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik daerah
	Pengamanan Barang Milik Daerah
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
Kegiatan Pengelola Pendapatan Daerah	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah
	Penagihan Pajak daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2023 dan Parkiraan Maju Tahun 2024										
Kabupaten Rejang Lebong										
Nama Perangkat Daerah		: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah								
Urusan/ Kode Baru		: Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan								
Bidang Urusan/ Kode Baru		: Keuangan								
Kode				Program dan Kegiatan		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)		Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana	Sumber Dana
(1)				(2)		(3)		(4)	(5)	(6)
2	13	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu		Kepala BPKD	BPKD	DAU
2	13	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		Kepala BPKD	BPKD	DAU
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Kepala BPKD	BPKD	DAU
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Kepala BPKD	BPKD	DAU
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah		Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu		Kepala BPKD	BPKD	DAU
2	13	0	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kepala BPKD	BPKD	DAU
2	13	0	2.02	02	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Kepala BPKD	BPKD	DAU
2	13	0	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Tepat Waktu		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen instalasi \Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik		Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.08	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Kepala BPKD	BPKD	DAU

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	02	01	2.08	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Kepala BPKD	BPKD	DAU
02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kepala BPKD	BPKD	DAU
02	01	2	09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi sara dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kepala BPKD	BPKD	DAU
						Persentase Program Kegiatan Yang tidak terlaksana	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan daerah	Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi	Kepala BPKD	BPKD	DAU

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kepala BPKD	BPKD	DAU
02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	02	2.05		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02'	02'	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan			DAU
5	02	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang diamankan, tertibkan dan dimanfaatkan			DAU
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU

Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Sumber Dana	Sumber Dana
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah			DAU
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan			DAU
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kepala BPKD	BPKD	DAU
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kepala BPKD	BPKD	DAU

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang disingkat Renja OPD merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh setiap OPD untuk periode 1(satu) tahun. Dokumen rencana kerja ini memuat program dan kegiatan yang direncanakan serta menggambarkan keluaran(*output*) atau hasil(*outcome*) yang akan dicapai, dengan pengalokasian sumber daya dalam anggaran agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong ini menginformasikan tugas dan fungsi serta rencana program dan kegiatan BPKD Kabupaten Rejang Lebong yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong dan Rencana Strategis (Renstra) BPKD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

Kami menyadari bahwa Renja ini masih terdapat berbagai kelemahan, dimana kelemahan tersebut akan dijadikan tolak ukur untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu berbagai saran dan kritikan akan sangat membantu BPKD Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dijabarkan melalui program dan kegiatan-kegiatan pada tahun-tahun berikutnya dan penyempurnaan kualitas Renja BPKD Kabupaten Rejang Lebong.

Harapan kami, semoga Renja ini dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan kinerja BPKD Kabupaten Rejang Lebong yang lebih baik di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMD dan
Pencapaian Renstra BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH s/d Tahun 2022
Kabupaten Rejang Lebong**

Tabel T-C.29

KODE				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Dengan Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiaan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja DPMD Tahun 2021	Realisasi DPMD Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
				Badan Pengelolaan Keuangan Daerah									
2	13	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akurat dan tepat waktu	100%	100%	100%	97.78%	97.78%	100%	100%	100%
2	13	01	2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Dokumen Perencanaan	100%	100%	100%	99.99%	99.99%	100%	100%	100%
2	13	01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	99.99%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
2	13	01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	99.99%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
2	13	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Terlaksananya	100%	100%	100%	90.52%	90.52%	100%	100%	100%
2	13	0	2.02	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/Bulan	840 Orang/Bulan	840 Orang/Bulan	840 Orang/Bulan	90.52%	840 Orang/Bulan	840 Orang/Bulan	100%
2	13	0	2.02	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	90.52%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2	13	0	2.02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	90.52%	14 Dokumen	14 Dokumen	100%
5	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	90.52%	90.52%	100%	100%	100%
5	02	01	2.06	Penyediaan Komponen instalasi \Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.52%	12 Paket	12 Paket	100%
5	02	01	2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.52%	12 Paket	12 Paket	100%
5	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.52%	12 Paket	12 Paket	100%
5	02	01	2.06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	12 Paket	90.52%	12 Paket	12 Paket	100%
5	02	01	2.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	90.52%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	02	01	2.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	60 Dokumen	90.52%	60 Dokumen	60 Dokumen	100%
5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100%	100%	100%	90.52%	90.52%	100%	100%	100%
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.52%	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	02	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	90.52%	12 Laporan	12 Laporan	100%

5	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Pelayana Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	90.52%	12 Bulan	12 Bulan	100%
5	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	100%	100%	90.52%	90.52%	100%	100%	100%
5	02	01	2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	90.52%	25 Unit	25 Unit	100%
02	01	2	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	90.52%	2 Unit	2 Unit	100%
02	01	2	09	Pemeliharaan /rehabilitasi sara dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	90.52%	10 Unit	10 Unit	100%
5	02	02		Program Pengelolaan Keuangan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	93.80%	93.80%	100%	100%	100%
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	100%	100%	100%	92.88%	92.88%	100%	100%	100%
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	50 Dok	50 Dok	50 Dok	50 Dok	98.29%	50 Dok	50 Dok	100%
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	100 Dok	100 Dok	100 Dok	100 Dok	98.14%	100 Dok	100 Dok	100%
5	02	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 Dok	100 Dok	100 Dok	100 Dok	83.96%	100 Dok	100 Dok	100%
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan daerah	Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	96%	95.97%	100%	100%	100%
5	02	02	2.03	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	35 Laporan	96.80%	35 Laporan	35 Laporan	100%
5	02	02	2.03	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	97.52%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
5	02	02	2.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	89.26%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
5	02	02	2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	100.00%	100%	100%	100%
02	02	2	04	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
02	02	2	04	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.00%	12 Laporan	12 Laporan	100%
5	02	02	2.05	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	Persentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	100%	100%	100%	100%	88.18%	100%	100%	100%

5	02'	02'	2.05	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	45 Orang	45 Orang	45 Orang	45 Orang	88.18%	45 Orang	45 Orang	100%
5	02	03		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	90.90%	90.90%	100%	100%	100%
5	02	03	2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	100%	100%	100%	90.90%	90.90%	100%	100%	100%
5	02	03	2.01	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	91.03%	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
5	02	03	2.01	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	76.86%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5	02	03	2.01	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	45 Dokumen	94.92%	45 Dokumen	45 Dokumen	100%
5	02	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	100%	100%	99.05%	99.05%	100%	100%	100%
5	02	04	2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	100%	100%	99.05%	99.05%	100%	100%	100%
5	02	04	2.01	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	99.59%	10 Laporan	10 Laporan	100%
5	02	04	2.01	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	15 Laporan	99.25%	15 Laporan	15 Laporan	100%
5	02	04	2.01	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	500 Objek Pajak	500 Objek Pajak	500 Objek Pajak	500 Objek Pajak	98.83%	500 Objek Pajak	500 Objek Pajak	100%
5	02	04	2.01	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	99.75%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
5	02	04	2.01	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	300 Dokumen	98.02%	300 Dokumen	300 Dokumen	100%

CURUP, 2022
Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

ANDY FERDIAN, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP.19850323 201001 1 029

**Pencapaian Kinerja Pelayanan BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (BPKD)
Kabupaten Rejang Lebong**

Tabel T-C.30

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra DPMD						Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nilai SAKIP Daerah	-	-	CC	B	B	B	B	B	CC	B	B	B	
2	Nilai SAKIP OPD	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
3	Opini BPK Terhadap Pelaporan Keuangan	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
4	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	-	-	7,61%	7,9%	8.0%	8,01%	8,03%	8,04%	6.98%	7,9%	8.0%	8,01%	
6	Persentase Aset daerah yang diamankan, dितertibkan dan dimanfaatkan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

CURUP, 2022
Pjt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

ANDY FERDIAN, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP.19850323 201001 1 029

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Rejang Lebong

Tabel T-C.31

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikator Rp.	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program	Target Capaian	Pagu Indikator Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					Badan Pengelolaan Keuangan Daerah					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab RL	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	23,133,750,218	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab RL	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%		
2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab RL	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	11,760,000	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab RL	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%		
2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	5,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		
2.01	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. RL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	6,760,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. RL	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen		
2.02	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab RL	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	21,826,050,306	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kab RL	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%		
2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. RL	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/Bulan	20,742,890,306	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. RL	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/Bulan		
2.02	02 Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. RL	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	791,160,000	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. RL	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		
2.02	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD	Kab RL	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	292,000,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD	Kab RL	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen		
2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. RL	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	695,840,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. RL	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%		
2.06	01 Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. RL	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	7,840,000	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. RL	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket		
2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. RL	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	98,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. RL	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket		
2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. RL	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	166,600,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. RL	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket		

2.06	05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Kab RL	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	12 Paket	88,200,000	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	Kab RL	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	12 Paket		
2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Kab. RL	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	120 Dokumen	90,200,000	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	Kab. RL	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	120 Dokumen		
2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab RL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dokumen	245,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab RL	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dokumen		
2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. RL	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100%	291,399,912	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. RL	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100%		
2.08	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. RL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14,700,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. RL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		
2.08	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. RL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	257,099,912	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. RL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan		
2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayana Pelayanan Umum Kantor	Kab. RL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	19,600,000	Penyediaan Jasa Pelayana Pelayanan Umum Kantor	Kab. RL	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan		
2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab RL	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	308,700,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab RL	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%		
2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kab. RL	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	25 Unit	93,100,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Kab. RL	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	25 Unit		
09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. RL	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	117,600,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. RL	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit		
09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi sara dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Kab. RL	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	98,000,000	Pemeliharaan /rehabilitasi sara dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya	Kab. RL	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit		
		Program Pengelolaan Keuangan daerah	Kab. RL	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	191,805,642,069	Program Pengelolaan Keuangan daerah	Kab. RL	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%		
2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab RL	Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	100%	852,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kab RL	Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	100%		
2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab RL	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	50 Dok	196,000,000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab RL	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	50 Dok		
2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. RL	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	100 Dok	294,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. RL	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	100 Dok		

2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. RL	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 Dok	362,600,000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. RL	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 Dok		
2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan daerah	Kab RL	Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	754,600,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan daerah	Kab RL	Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%		
2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab RL	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi	35 Laporan	137,200,000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab RL	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi	35 Laporan		
2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab RL	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	539,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab RL	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen		
2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10 Dokumen	78,400,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10 Dokumen		
2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. RL	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	190,198,442,069	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. RL	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%		
04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. RL	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	186,198,442,069	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. RL	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan		
04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. RL	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	4,000,000,000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. RL	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		
2.05		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	Kab. RL	Persentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	100%	-	Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	Kab. RL	Persentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	100%		
2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. RL	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	45 Orang	-	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. RL	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	45 Orang		
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	931,000,000	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%		
2.01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	100%	931,000,000	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	100%		
2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	294,000,000	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen		
2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	147,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Dokumen		

2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	45 Dokumen	490,000,000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	45 Dokumen		
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. RL	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	1,109,360,000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. RL	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%		
2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. RL	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	1,109,360,000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kab. RL	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%		
2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	147,000,000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan		
2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15 Laporan	501,760,000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15 Laporan		
2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. RL	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	500 Objek Pajak	186,200,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kab. RL	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	500 Objek Pajak		
2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	127,400,000	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen		
2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300 Dokumen	147,000,000	Penagihan Pajak Daerah	Kab. RL	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300 Dokumen		

CURUP, 2022
Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

ANDY FERDIAN, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP.19850323 201001 1 029

TABEL TC. 32
 DAFTAR USULAN RENCANA PEMBANGUNAN
 HASIL MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TAHUN 2023
 USULAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI DAN DUNIA USAHA

NO	PROGRAM RPJMD	PROGRAM/KEGIATAN	USULAN MUSRENBANG			USULAN RESES		
			USULAN	VOLUME	SUMBER DANA	USULAN	VOLUME	SUMBER DANA
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

CURUP, 2022
 Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 KABUPATEN REJANG LEBONG

ANDY FERDIAN, SE
 Penata TK. I (III/d)
 NIP.19850323 201001 1 029

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN													
5	02				KEUANGAN								216,979,752,287				219,623,620,744	
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								23,133,750,218				23,160,602,218	
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								11,760,000				11,995,200	
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	3 Dokumen	100 Persen	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	5,000,000
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Persentase dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	6,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	6,995,200
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								21,826,050,306				21,834,010,306	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Orang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	840 orang/bulan	100 Persen	20,742,890,306	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100 Persen	20,742,890,306
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Meningkatnya Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	100 Persen	791,160,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100 Persen	791,280,000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Meningkatnya Persentase terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	14 Dokumen	100 Persen	292,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100 Persen	299,840,000
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								695,840,000				707,636,800	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	7,840,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	7,916,800
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	98,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	99,960,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	166,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	169,932,000
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Paket	100 Persen	88,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	89,964,000
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perudang-undangan	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	120 Dokumen	100 Persen	90,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	89,964,000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	60 Dokumen	100 Persen	245,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	249,900,000
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								291,399,912	292,085,912				
5	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Meningkatnya Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	14,700,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	14,994,000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Meningkatnya Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	257,099,912	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	257,099,912
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Meningkatnya Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Dalam Keadaan Baik	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	19,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	19,992,000
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								308,700,000	314,874,000				
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	25 unit	100 Persen	93,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	94,962,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	2 unit	100 Persen	117,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	119,952,000
5	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	0 Unit 10 unit	100 Persen	98,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang akuntabel dan Tepat Waktu	100 Persen	99,960,000
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH								191,805,642,069	194,173,300,326				
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah								852,600,000	869,652,000				
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	Meningkatnya Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	50 Dokumen	100 Persen	196,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	199,920,000
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Meningkatnya Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Dokumen	100 Persen	294,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	299,880,000
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Meningkatnya Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	100 Dokumen	100 Persen	362,600,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun Dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	369,852,000
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah								754,600,000	769,692,000				
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan laporan Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi	Meningkatnya Persentase kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	35 Laporan	100 Persen	137,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	139,944,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Meningkatnya Persentase kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	5 Dokumen	100 Persen	539,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	549,780,000
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Meningkatnya Persentase kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Dokumen	100 Persen	78,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	79,968,000
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah								190,198,442,069	192,533,956,326				
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Peningkatan Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	186,198,442,069	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	188,533,956,326
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Peningkatan Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Laporan	100 Persen	4,000,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	4,000,000,000
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah								0	0				
5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	45 orang	100 Persen	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Perencanaan dan Menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 Persen	0
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH								931,000,000	949,620,000				
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah								931,000,000	949,620,000				
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Standart Barang Milik Daerah dan standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	10 Dokumen	100 Persen	294,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	299,880,000

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Rejang Lebong
Tahun 2023

Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Sub Unit Organisasi : 5.02.0.00.0.00.27.0000 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	12 Dokuman	100 Persen	147,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	149,940,000
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Meningkatnya Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 persen	45 Dokumen	100 Persen	490,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100 persen	499,800,000
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH								1,109,360,000	1,131,547,200				
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah								1,109,360,000	1,131,547,200				
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	10 Laporan	7.9 Persen	147,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	149,940,000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah	Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	15 Laporan	7.9 Persen	501,760,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	511,795,200
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	500 Objek Pajak	7.9 Persen	186,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	189,924,000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	12 Dokumen	7.9 Persen	127,400,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	129,948,000
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Meningkatnya Persentase Pendapatan Asli Daerah	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 Persen	300 Dokumen	7.9 Persen	147,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100 Persen	149,940,000
TOTAL													216,979,752,287	219,623,620,744				

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Rejang Lebong

Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif 2023 (Rp)	Prakiraan Maju 2024 (Rp)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1					2	4	5	6	4	5	6	7	6	7	8	9	10
2	13	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%					23,133,750,218	23,160,602,218	
2	13	01	2.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kab. Rejang Lebong					Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	11,760,000	11,995,200	
2	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	5,000,000	5,000,000	
2	13	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Dokumen	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	6,760,000	6,995,200	
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%			Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	21,826,050,306	21,834,010,306	

2	13	0.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	840 Orang/Bulan	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	20,742,890,306	20,742,890,306	
2	13	0.01	2.02	02	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	791,160,000	791,280,000	
2	13	0.01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Atau Verifikasi Keuangan SKPD			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14 Dokumen	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	292,000,000	299,840,000	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%			Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	695,840,000	707,636,800	
5	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi \Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	7,840,000	7,916,800	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Paket	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	98,000,000	99,960,000	
5	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	166,600,000	169,932,000	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Paket Barang Cetak & Penggandaan yang disediakan	12 Paket	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	88,200,000	89,964,000	
5	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan & Perat. Perundang-Undangan	120 Dokumen	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	90,200,000	89,964,000	

5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Dokumen	Persentase Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tepat waktu	100%	245,000,000	249,900,000	
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100%	291,399,912	292,085,912	
5	02	01	2.08	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100%	14,700,000	14,994,000	
5	02	01	2.08	02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100%	257,099,912	257,099,912	
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Bulan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam keadaan baik	100%	19,600,000	19,992,000	
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	308,700,000	314,874,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak perizinannya	25 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	93,100,000	94,962,000	
02	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi, Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	117,600,000	119,952,000	
02	01	2	09	11	Pemeliharaan /rehabilitasi sara dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya			Kab. Rejang Lebong	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	100%	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor/ Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	10 Unit	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam Keadaan Baik	100%	98,000,000	99,960,000	

5	02	02			Program Pengelolaan Keuangan daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%					191,805,642,069	194,173,300,326	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%			Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	100%	852,600,000	869,652,000	
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	50 Dok	Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	100%	196,000,000	199,920,000	
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	100 Dok	Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	100%	294,000,000	299,880,000	
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	100 Dok	Persentase Pencapaian Penyusunan Rencana Anggaran Daerah oleh Perangkat Daerah	100%	362,600,000	369,852,000	
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%			Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	754,600,000	769,692,000	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan PEMDA yang terkonsolidasi	35 Laporan	Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	137,200,000	139,944,000	

5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	539,000,000	549,780,000	
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10 Dokumen	Persentase Pelaksanaan Akutansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100%	78,400,000	79,968,000	
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%			Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	190,198,442,069	192,533,956,326	
02	02	2	04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan	100%	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	12 Laporan	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	186,198,442,069	188,533,956,326	
02	02	2	04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	4,000,000,000	4,000,000,000	
5	02	02	2.05		Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%			Persentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan Daerah	100%	-	-	
5	02'	02'	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota			Kab. Rejang Lebong	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dokumen perencanaan dan menyampaikan Laporan Keuangan	100%	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	45 Orang	Persentase Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lingkup keuangan	100%	-	-	

5	02	03			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	100%					931,000,000	949,620,000	
5	02	03	2.01		Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	100%			Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	100%	931,000,000	949,620,000	
5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-	100%	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	100%	294,000,000	299,880,000	
5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	Jumlah Laporan Pengamanan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	100%	147,000,000	149,940,000	
5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	100%	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	45 Dokumen	Persentase Aset Daerah yang diamankan, ditertibkan dan dimanfaatkan	100%	490,000,000	499,800,000	
5	02	04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%					1,109,360,000	1,131,547,200	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%			Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	1,109,360,000	1,131,547,200	
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	10 Laporan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	147,000,000	149,940,000	
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah			Kab. Rejang Lebong	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	15 Laporan	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	501,760,000	511,795,200	

5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Kab. Rejang Lebong	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	Jumlah Objek Pajak yang disesuaikan NJOP nya	500 Objek Pajak	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	186,200,000	189,924,000	
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Kab. Rejang Lebong	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	127,400,000	129,948,000	
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah		Kab. Rejang Lebong	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan dan Prestasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah	100%	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	300 Dokumen	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan	100%	147,000,000	149,940,000	

CURUP, 2022
**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG**

ANDY FERDIAN, SE
Penata TK. I (III/d)
NIP.19850323 201001 1 029